

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/JURNAL

- Bird, Richard M. dan Francois Vaillancourt,. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang: Tinjauan Umum, dalam Richard M.Bird dan Francois Vaillancourt (Penyunting), Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang (Terjemahan)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Booth, Anne, *Upaya-Upaya untuk Mendesentralisasikan Kebijakan Perpajakan; Masalah Kemampuan Perpajakan, Usaha Perpajakan dan Perimbangan Keuangan*, dalam Collin McAndrews dan Ichlasul Amal (editor), Rajawali Press, Jakarta, 2000.
- Cheema, G. Shabbir and Rondinelli, Dennis A., *Decentralization and Development : Conclusion and Directions*, 1998.
- Davey, K.J., *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, terjemahan Ammanullah, UI Press, 1988.
- Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1994
- Elmi, Bachrul, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2002
- Gordon, Roger H. & Wilson, John D., *Expenditure Competition*, NBER Working Paper No. W8189, Social Science Research Network, 2001. (<http://ssrn.com>)
- Hidayat Syarif, *Tantangan Otonomi Daerah*, Majalah Amanat Nasional, Edisi 081/Th.II, Mei, 2000, Jakarta. (katalog.pdii.lipi.go.id/index.php)
- Imro, *Putusan MK 13/PUU-VII/2008 dan Pendidikan Kita*, 2008 (<http://www.anggaran.depkeu.go.id>)
- Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta. 2005.
- Klaren, Peter F. & Thomas J. Bossert, *Promise of Development (Paperback)*, Westview Press; 2nd Ed edition, 1998 (<http://www.amazon.com>)
- Kuncoro, Mudrajat, *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Penerbit Eralangga, 2004.
- Mardiasmo, *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah*, dalam Majalah Swara MEP, Vol 4 No.9, Juli 2003.

- McAndrews, Colin dan Amal, Ichlasul, *Upaya-Upaya untuk Mendesentralisasikan Kebijakan Perpajakan; Masalah Kemampuan Perpajakan, Usaha Perpajakan dan Perimbangan Keuangan*, Rajawali Press, Jakarta, 2000.
- Muhidin, Sambas Ali, *Desentralisasi Pendidikan*, Universitas Pendidikan Indonesia, 22 Januari 2010. (<http://www.sambasalim.com>).
- Oates, Wallece E., *Fiscal Federalism*. New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1972. (www.competition-regulation.org.uk).
- Pratt, John W. & Zeckhauser, Richard, *Management; Agency (Law); Congresses; Economic Aspects*, Harvard Business School Press (Boston, Mass.), 1991.
- Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Satriyo, Hana A. dkk, *Indonesia Rapid Desentralization Appraisal (IRDA) : Laporan Ke-3*, The Asia Foundation, Jakarta, 2003.
- Shah, Anwar and Theresa Thompson, *Implementing Dezentralized Local Governance : A Teacherous Road with Potholes, Detours and Road Closures, Prepared for "Can Decentralization Help Rebuild Indonesia?" A Conference Sponsored by The International Studies Program, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State, University, Atlanta*, 2002.
- Smith, B.C., *Decentralization: The Territorial dimension of The State* London: George Allen and Unwin. 1985.
- Suminto, *Beberapa Catatan Tahun Desentralisasi Fiskal*, Majalah Anggaran, Edisi Khusus Hari Keuangan, 2003.
- Sukmawati, Tri, *Desentralisasi Fiskal dan Perubahan Kebijakan Belanja Daerah*, Magister Administrasi Publik, UGM, 2007.
- Suryadi, Ace, *Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan : Isu, Teori dan Aplikasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Suryawiyata, *Anggaran Pendidikan 9,8%*, Fratres Immaculatae Conceptionis 2007. www.bruderfic.or.id
- Suyanto dan Abbas, M.S. *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*, Adicita, Cetakan 1, Yogyakarta, 2001.
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan AR, Mustopadidjaja, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan, Teori dan Penerpaan*, LP3ES, Jakarta. 1988.

Wildasin, David E., *Externalities and Bailouts : Hard and Soft Budget Constraints in Intergovernmental Fiscal Relations*, Policy Research Working Paper Series 1843, The World Bank, 1997.

Wibawa, Samudra, dkk. *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Med Press, Jakarta, 2002.

B. PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 425/Kep.84-Disdik/III/2008 tentang Penyelenggaraan Bebas Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bekasi Tahun 2008

Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 425/Kep.24-Disdik/II/2009 tentang Penyelenggaraan Bebas Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bekasi Tahun 2009.

Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 420/Kep.143-Disdik/IV/2009 tentang Penyelenggaraan Subsidi Biaya Pendidikan untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan Swasta, Salafiyah, SD Swasta dan SDLB se-Kota Bekasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2008-2013